



**BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR e-0053 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN KURIKULUM PELATIHAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN
(ANALISIS KEMISKINAN) BAGI PEGAWAI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
PROVINSI DKI JAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan kerangka acuan pembelajaran, meningkatkan kualitas pelatihan berbasis kompetensi, dan sebagai bentuk desain pembelajaran, maka perlu ditetapkan Kurikulum Pelatihan Penanggulangan Kemiskinan (Analisis Kemiskinan) sebagai acuan untuk penyelenggaraan pelatihan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia tentang Penetapan Kurikulum Pelatihan Penanggulangan Kemiskinan (Analisis Kemiskinan).
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional yang beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan;
2. Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial sebagaimana telah diubah dengan

- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6397);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 83);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 141);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Upaya Penanganan Fakir Miskin melalui Pendekatan Wilayah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 157) ;
 8. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan

Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 199);

9. Peraturan Presiden Nomor 166 Tahun 2014 tentang Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 341);
10. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2020 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Penghargaan dan Penghormatan, Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 143);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 794);
12. Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Pembinaan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Teknis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 544);
13. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pengembangan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1127);
14. Keputusan Ketua Lembaga Administrasi Negara Nomor 280/IX/6/4/1996 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum, Garis-Garis Besar Program Pengajaran dan Bahan Pendidikan dan Pelatihan bagi Diklat Teknis dan Diklat Fungsional;
15. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2019 Nomor 201, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 2007);

16. Peraturan Gubernur Nomor 110 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi dan Sertifikasi Profesi Sumber Daya Manusia (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2017 Nomor 72062);
17. Peraturan Gubernur Nomor 164 Tahun 2017 tentang Manajemen Pengetahuan (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2017 Nomor 52089);
18. Peraturan Gubernur Nomor 40 Tahun 2018 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (Berita Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2018 Nomor 75009);
19. Peraturan Gubernur Nomor 40 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2023 Nomor 71012);
20. Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2023 tentang Perencanaan Pengembangan Kompetensi Terintegrasi (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2023 Nomor 71014);
21. Keputusan Gubernur Nomor 862 Tahun 2023 tentang Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023-2026;
22. Keputusan Gubernur Nomor 1211 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pegawai Negeri Sipil Melalui Pendekatan Sistem Pembelajaran Terintegrasi/Terpadu di lingkungan Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta (*Jakarta Corporate University*).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KURIKULUM PELATIHAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN (ANALISIS KEMISKINAN) BAGI PEGAWAI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA
- KESATU : Penetapan sebagaimana dimaksud tertuang dalam lampiran-lampiran Surat Keputusan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia ini dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan.
- KEDUA : Apabila Kurikulum Pelatihan Penanggulangan Kemiskinan (Analisis Kemiskinan) ini tidak relevan pada masa yang akan datang, maka akan dilakukan revisi dan kaji ulang sesuai dengan kebutuhan.
- KETIGA : Keputusan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 Mei 2024

KEPALA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
PROVINSI DKI JAKARTA,



MOCHAMAD MIFTAHULLOH T
NIP 197812131997111001

Tembusan:

1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta;
2. Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta;
3. Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta;
4. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta;
5. Kepala Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta;
6. Kepala Biro Kesejahteraan Sosial Setda Provinsi DKI Jakarta.

Lampiran : Keputusan Kepala BPSDM
Provinsi DKI Jakarta

Nomor e-0053 Tahun 2024
Tanggal 13 Mei 2024

**KURIKULUM PELATIHAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN
(ANALISIS KEMISKINAN)**

A. NAMA PELATIHAN

Pelatihan Penanggulangan Kemiskinan (Analisis Kemiskinan)

B. RUMPUN PELATIHAN

Pelatihan Penanggulangan Kemiskinan (Analisis Kemiskinan) merupakan pelatihan teknis pada rumpun kompetensi teknis.

C. DESKRIPSI SINGKAT

Sejalan dengan Agenda Global 2030 melalui upaya pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals (TPB/SDGs), Pemerintah telah menetapkan komitmen untuk mengakselerasi percepatan penanggulangan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem pada Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem. Kemiskinan merupakan situasi dimana seseorang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar minimum yang diperlukan agar dapat hidup secara layak dan bermartabat. Secara nasional, kemiskinan diukur dengan perspektif moneter (*monetary approach*). Pengukuran kemiskinan dilakukan dengan memanfaatkan hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) oleh Badan Pusat Statistik (BPS).

Seseorang dikategorikan miskin secara moneter apabila memiliki tingkat pengeluaran per kapita dalam rumah tangga lebih kecil dari Garis Kemiskinan. Garis Kemiskinan ditetapkan oleh BPS berdasarkan pengeluaran atau pendapatan minimum untuk (1) memperoleh sejumlah makanan untuk memenuhi kebutuhan kalori tertentu, dan (2) memperoleh kebutuhan bukan makanan secara minimum untuk hidup secara layak. Berdasarkan BPS, Garis Kemiskinan secara nasional ditetapkan sebesar Rp 550.458,- per kapita/bulan. Sementara, Garis Kemiskinan Ekstrem secara nasional sebesar USD 1,9 per kapita/hari atau setara dengan Rp 11.571,21 per kapita/hari. Artinya,

seseorang dengan pengeluaran per hari lebih kecil dari Rp 11.571,21 dikategorikan sebagai miskin ekstrem.

Besar dan kecilnya tingkat pengeluaran per kapita dalam rumah tangga, dipengaruhi oleh sejumlah faktor di antaranya Inflasi, Tingkat Pengangguran Terbuka, hingga Rasio Gini. Pemahaman akan situasi kemiskinan, serta faktor-faktor yang menjadi determinan dari situasi tersebut merupakan elemen penting untuk dimiliki para pemangku kepentingan, khususnya Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai perumus serta pelaksana kebijakan yang memiliki dampak pada pencapaian indikator kinerja pembangunan, termasuk Tingkat Kemiskinan. Berpijak pada hal tersebut, diperlukan rancangan Pelatihan Analisis Kemiskinan yang bertujuan memberikan pemahaman yang komprehensif tentang kemiskinan beserta determinannya.

Kurikulum ini dimulai dengan pendahuluan yang memberikan konteks tentang masalah kemiskinan secara global, nasional, hingga lokal; menjelaskan penyebab, dampak, dan tantangan yang terkait secara umum. Selanjutnya, pengenalan akan instrumen pendataan yang digunakan secara nasional untuk menghitung Tingkat Kemiskinan maupun Tingkat Kemiskinan Ekstrem yakni Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas). Pengenalan terhadap Susenas (meliputi di antaranya proses pengambilan sampel, kuesioner, dsb) diharapkan dapat semakin mempertajam keterampilan ASN dalam merumuskan kebijakan terkait penanggulangan kemiskinan di daerah.

Setelah memahami terkait dengan Susenas, selanjutnya peserta dilatih memanfaatkan data Susenas untuk menghitung Tingkat Kemiskinan (P0), Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1), Indeks Keparahan Kemiskinan (P2), dan Tingkat Kemiskinan Ekstrem. Penghitungan Tingkat Kemiskinan tersebut dilakukan dengan memanfaatkan aplikasi pengolahan data yakni STATA. Sebelum praktik penghitungan dilakukan, pengenalan terkait dengan perangkat aplikasi STATA diberikan dalam sesi pelatihan.

Pemahaman akan sejumlah indikator yang mendeterminasi kemiskinan juga diberikan pada peserta, di antaranya konsep, definisi, sumber data, dan metode pengukuran dari Inflasi, Tingkat Pengangguran Terbuka, hingga Rasio Gini. Selain itu, melakukan analisis korelasi antara Tingkat Kemiskinan dan sejumlah indikator determinannya untuk mengetahui indikator yang memiliki signifikansi terhadap kinerja Tingkat Kemiskinan berdasarkan rentang waktu tertentu.

Pada bagian akhir dari pelatihan, peserta akan diberikan materi studi kasus untuk menghitung Tingkat Kemiskinan (P0), Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1), Indeks Keparahan Kemiskinan (P2), dan Tingkat Kemiskinan Ekstrem dengan memanfaatkan data melalui aplikasi STATA.

Dengan pengetahuan praktis dan studi kasus yang disajikan, peserta akan memiliki pemahaman yang lebih baik tentang aplikasi konsep dan teknik analisis dalam situasi nyata. Kesimpulan kurikulum ini akan merangkum pembelajaran kunci dan menyoroti langkah-langkah lanjutan yang dapat diambil oleh peserta untuk berkontribusi dalam upaya penanggulangan kemiskinan.

Dengan demikian, Pelatihan Penanggulangan Kemiskinan (Analisis Kemiskinan) bertujuan untuk mempersiapkan peserta dengan pengetahuan, keterampilan, dan pemahaman yang dibutuhkan untuk menjadi agen perubahan dalam menangani masalah kemiskinan di Provinsi DKI Jakarta.

1. Pengenalan Awal terkait Situasi Kemiskinan pada skala global, nasional dan lokal:

Pemberian pengantar sebagai peletakan dasar konteks terkait dengan topik utama pelatihan bagi peserta. Penjelasan mengenai situasi kemiskinan disajikan pada lingkup global hingga lokal di Provinsi DKI Jakarta. Pada bagian ini juga dijabarkan secara umum mengenai penyebab, dampak, dan tantangan yang terkait dengan upaya pencapaian target penurunan Tingkat Kemiskinan.

2. Pengenalan Instrumen Pendataan Kemiskinan melalui Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas):

Peserta dibekali dengan pengetahuan seputar mekanisme pendataan yang digunakan dalam pengukuran Tingkat Kemiskinan secara nasional. Mekanisme pendataan tersebut meliputi di antaranya tata cara pengambilan sampel, pengenalan akan kuesioner, serta waktu pengambilan data.

3. Pengenalan Aplikasi Pengolahan Data Susenas (dalam pelatihan ini menggunakan STATA):

Pada bagian ini, peserta diperlengkapi dengan pengetahuan mengenai aplikasi STATA. Aplikasi tersebut diharapkan dapat membantu dalam mengolah data yang nantinya akan digunakan untuk mengukur kemiskinan.

4. Pengenalan dan Praktik Menghitung Tingkat Kemiskinan (P0), Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1), Indeks Keparahan Kemiskinan (P2), dan Tingkat Kemiskinan Ekstrem:

Setelah memiliki pemahaman mengenai konteks kemiskinan, instrumen pendataan, serta aplikasi pengolahan data kemiskinan, selanjutnya peserta diperkenalkan dengan cara penghitungan indikator-indikator utama kemiskinan yakni Tingkat Kemiskinan (P0), Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1), Indeks Keparahan Kemiskinan (P2), dan Tingkat Kemiskinan Ekstrem. Langkah berikutnya, peserta mempraktikkan pengetahuan yang telah dimiliki dengan melakukan penghitungan indikator-indikator utama kemiskinan.

Penghitungan tersebut dipertajam dengan meninjau berdasarkan disagregasi data sosial-ekonomi, di antaranya jenis kelamin, kelompok usia, status disabilitas, wilayah kota/kabupaten, pendidikan kepala rumah tangga, dsb. Pemahaman mengenai hal tersebut, diharapkan dapat mempertajam daya analitis peserta mengenai situasi kemiskinan berdasarkan pada data.

5. Pengenalan Indikator Inflasi, Tingkat Pengangguran Terbuka, dan Rasio Gini sebagai Beberapa Determinan dari Tingkat Kemiskinan:

Inflasi, Tingkat Pengangguran Terbuka, dan Rasio Gini merupakan tiga determinan penting terhadap kinerja penanggulangan kemiskinan. Oleh karenanya, peserta akan diperkenalkan dengan konsep, definisi, sumber data, dan metode pengukuran ketiga indikator tersebut.

6. Analisis Korelasi antara Tingkat Kemiskinan dan Inflasi, Tingkat Pengangguran Terbuka, serta Rasio Gini:

Praktik analisis untuk mengetahui korelasi antara Tingkat Kemiskinan dan sejumlah indikator determinannya dilakukan agar peserta memahami pola korelasi untuk masing-masing variabel tersebut sesuai dengan konteks masing-masing wilayah.

Dengan memperhatikan semua aspek di atas, kurikulum pelatihan penanggulangan kemiskinan (Analisis Kemiskinan) diharapkan dapat memberikan pemahaman yang komprehensif tentang masalah kemiskinan sebagai bagian dari proses penajaman dalam perumusan strategi/kebijakan penanggulangan kemiskinan di Provinsi DKI Jakarta. Kurikulum ini diharapkan mampu membekali para peserta dengan keterampilan dan pengetahuan yang dibutuhkan untuk berkontribusi dalam upaya penanggulangan kemiskinan secara efektif dan berkelanjutan.

D. TUJUAN KURIKULUM UMUM

Setelah mengikuti pelatihan ini peserta diharapkan mampu menyusun analisis penanggulangan kemiskinan berdasarkan pemahaman dan ketrampilan yang komprehensif (perhitungan kemiskinan, pengangguran, inflasi dan tingkat pendapatan) berdasarkan hasil evaluasi yang telah dilakukan.

E. TUJUAN KURIKULUM KHUSUS

Setelah mengikuti pelatihan ini peserta diharapkan dapat:

1. Menganalisis dan Menghitung Tingkat Kemiskinan (P0), Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1), Indeks Keparahan Kemiskinan (P2), dan Tingkat Kemiskinan Ekstrem.
2. Mengenali dan Menganalisis Korelasi antara Tingkat Kemiskinan dan Indikator Determinannya (Inflasi, Tingkat Pengangguran Terbuka, dan Rasio Gini).

F. POKOK BAHASAN DAN SUB POKOK BAHASAN

1. Pengenalan Awal terkait Situasi Kemiskinan pada skala global, nasional dan lokal;
2. Pengenalan Instrumen Pendataan Kemiskinan melalui Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas);
3. Pengenalan Aplikasi Pengolahan Data Susenas (dalam pelatihan ini menggunakan STATA);
4. Pengenalan dan Praktik Menghitung Tingkat Kemiskinan (P0), Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1), Indeks Keparahan Kemiskinan (P2), dan Tingkat Kemiskinan Ekstrem;
5. Pengenalan Indikator Inflasi, Tingkat Pengangguran Terbuka, dan Rasio Gini sebagai Beberapa Determinan dari Tingkat Kemiskinan;
6. Analisis Korelasi antara Tingkat Kemiskinan dan Inflasi, Tingkat Pengangguran Terbuka, serta Rasio Gini; dan
7. Ujian Akhir:
 - a. Menghitung Tingkat Kemiskinan (P0), Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1), Indeks Keparahan Kemiskinan (P2), dan Tingkat Kemiskinan Ekstrem dengan memanfaatkan data Susenas melalui aplikasi pengolahan data STATA.

G. KEPESERTAAN

1. Pegawai di sejumlah unit kerja yang tergabung dalam TKPK, terdiri dari;
 - a. Inspektorat;
 - b. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - c. Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk;
 - d. Dinas Sosial;
 - e. Dinas Kesehatan;
 - f. Dinas Pendidikan;
 - g. Dinas Kebudayaan;
 - h. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
 - i. Dinas Pemuda dan Olahraga;
 - j. Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian;
 - k. Dinas Perhubungan;
 - l. Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi;
 - m. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
 - n. Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
 - o. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - p. Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik;
 - q. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
 - r. Dinas Sumber Daya Air;
 - s. Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan;
 - t. Kota Administrasi Jakarta Pusat;
 - u. Kota Administrasi Jakarta Timur;
 - v. Kota Administrasi Jakarta Utara;
 - w. Kota Administrasi Jakarta Barat;
 - x. Kota Administrasi Jakarta Selatan;
 - y. Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu;
 - z. Biro Kesejahteraan Sosial;
 - å. Biro Pendidikan dan Mental Spiritual;
 - ä. Biro Pemerintahan;
 - ö. Biro Perekonomian dan Keuangan;
 - aa. Biro Pembangunan dan Lingkungan Hidup;

2. Diusulkan dan mendapat penugasan dari pimpinan satuan kerja di instansi terkait.
3. Tidak sedang menjalani hukuman disiplin dan mengikuti pelatihan lain.
4. Jumlah peserta pada setiap angkatan pelatihan maksimal 30 orang.

H. MODEL PEMBELAJARAN

Klasikal

Pelatihan

Lokakarya/ *Workshop*

Bimbingan Teknis

Lainnya (Seminar, Kursus, dan pengembangan sumber daya manusia lain)

Non-klasikal

e-learning

Pelatihan jarak jauh

Coaching & mentoring

On the job training

Blended learning

I. STRUKTUR PEMBELAJARAN

PELATIHAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN (ANALISIS KEMISKINAN)

No	Kegiatan	Nama Mata Pelajaran	Jam Pelajaran				Sekuen
			Pengetahuan	Keterampilan	Sikap	TOTAL	
1	Mata Pelajaran Pokok	Pengenalan Awal terkait Situasi Kemiskinan pada skala global, nasional dan lokal.	3	-	-	3	3
2		Pengenalan Instrumen Pendataan Kemiskinan melalui Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas).	3	3	-	6	4
3		Pengenalan Aplikasi Pengolahan Data Susenas (dalam pelatihan ini menggunakan STATA).	2	3	-	5	5
4		Pengenalan dan Praktik Menghitung Tingkat Kemiskinan (P0), Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1), Indeks Keparahan Kemiskinan (P2), dan Tingkat Kemiskinan Ekstrem.	3	9	-	12	6
5		Pengenalan Indikator Inflasi, Tingkat Pengangguran Terbuka, dan Rasio Gini sebagai Beberapa Determinan dari Tingkat Kemiskinan.	2	3	-	5	7

No	Kegiatan	Nama Mata Pelajaran	Jam Pelajaran				Sekuen
			Pengetahuan	Keterampilan	Sikap	TOTAL	
6		Analisis Korelasi antara Tingkat Kemiskinan dan Inflasi, Tingkat Pengangguran Terbuka, serta Rasio Gini.	2	3	-	5	8
Total (1 s.d. 5)		36 JP					
5	Ceramah Pimpinan		-	-	-	-	-
6	PKL		-	-	-	-	-
7	Outbound		-	-	-	-	-
8	MFD		-	-	-	-	-
9	Pengarahan Program		1	-	-	1	1
10	Building Learning Commitment		1	-	1	2	2
11	Forum Diskusi (CoP)		-	-	-	-	-
12	Coaching dan Mentoring		-	-	-	-	-
13	Action Learning		-	-	-	-	-
14	Lama waktu ujian		9 JP				9
Total (5 s.d. 14)			12 JP				
TOTAL JP KESELURUHAN			48 JP				
DILAKSANAKAN DALAM							
☐ Structured Learning : 5 hari kerja							

Tahapan Kegiatan

Hari ke-	JP	Materi
1	TM 12 JP	<ul style="list-style-type: none"> - Pengarahan Program - BLC/Dinamika Kelompok - Sesi: Pengenalan Awal terkait Situasi Kemiskinan pada skala global, nasional dan lokal. - Sesi: Pengenalan Instrumen Pendataan Kemiskinan melalui Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas).
2	TM 9 JP	<ul style="list-style-type: none"> - Sesi: Pengenalan Aplikasi Pengolahan Data Susenas (dalam pelatihan ini menggunakan STATA). - Sesi: Pengenalan dan Praktik Menghitung Tingkat Kemiskinan (P0), Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1), Indeks Keparahan Kemiskinan (P2), dan Tingkat Kemiskinan Ekstrem.
3	TM 9 JP	<ul style="list-style-type: none"> - Sesi: Pengenalan dan Praktik Menghitung Tingkat Kemiskinan (P0), Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1), Indeks Keparahan Kemiskinan (P2), dan Tingkat Kemiskinan Ekstrem (LANJUTAN DARI HARI SEBELUMNYA).

Hari ke-	JP	Materi
		- Sesi: Pengenalan Indikator Inflasi, Tingkat Pengangguran Terbuka, dan Rasio Gini sebagai Beberapa Determinan dari Tingkat Kemiskinan.
4	TM 9 JP	- Sesi: Pengenalan Indikator Inflasi, Tingkat Pengangguran Terbuka, dan Rasio Gini sebagai Beberapa Determinan dari Tingkat Kemiskinan (LANJUTAN DARI HARI SEBELUMNYA) - Sesi: Analisis Korelasi antara Tingkat Kemiskinan dan Inflasi, Tingkat Pengangguran Terbuka, serta Rasio Gini.
5	TM 9 JP	- Ujian Akhir

J. KUALIFIKASI PENGAJAR

Pengajar dapat berasal dari widyaiswara, pejabat atau pelaksana potensial yang ditugaskan dari OPD, dan pakar atau praktisi dengan kualifikasi sebagai berikut:

1. Memiliki kompetensi dalam melakukan pengajaran di bidang Analisis Penanggulangan Kemiskinan ;
2. Pejabat atau pelaksana potensial OPD yang dapat menyajikan materi terkait ruang lingkup tugasnya;
3. Khusus untuk widyaiswara, telah mengikuti *Training of Trainers (ToT)* kewidyaiswaraan.

K. EVALUASI

Evaluasi Level 1

1. Kualitas penyelenggaraan yang meliputi kualitas layanan kepada peserta (sikap, dukungan informasi dan koordinasi) dan kualitas penyediaan sarana dan prasarana selama pelatihan;
2. Kualitas pengajar yang meliputi penguasaan materi & metode pembelajaran, pengelolaan waktu mengajar, penampilan, kedisiplinan, dan interaksi dengan peserta pelatihan.

Evaluasi Level 2

1. Sikap dan perilaku dengan bobot 30% pada aspek disiplin, kerja sama, dan prakarsa selama pelaksanaan pelatihan;
2. Praktik dengan bobot 70% dilihat dari Menghitung Tingkat Kemiskinan (P0), Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1), Indeks Keparahan Kemiskinan (P2), dan Tingkat Kemiskinan Ekstrem dengan memanfaatkan data Susenas melalui aplikasi pengolahan data STATA.

Evaluasi Level 3

Dilaksanakan setidaknya enam bulan pasca pelatihan untuk mengevaluasi dampak pelatihan pada kualitas kinerja, meliputi aspek kesesuaian penugasan pasca mengikuti pelatihan. Selain itu juga mengevaluasi kelancaran pengerjaan tugas dan fungsi setelah memiliki kompetensi dalam merencanakan program penanggulangan kemiskinan.

L. FASILITAS PEMBELAJARAN

1. Ruang kelas, Ruang fasilitator;
2. Ruang makan, Ruang ibadah;
3. *Flipchart, White board;*
4. Laptop, printer, laser pointer, LCD Projector, *sound system;*
5. Kasus/Lembar Kerja;
6. *Post-it, meta plan;*
7. *Learning Management System (LMS);* dan Media pembelajaran lainnya.

M. INFORMASI LAIN-LAIN

1. Tahap *structured learning* akan dilaksanakan secara tatap muka;
2. SURAT TANDA TAMAT PELATIHAN (STTP) akan diberikan kepada peserta yang lulus melalui Sistem Informasi Kediklatan (SIMDIKLAT).

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 Mei 2024

KEPALA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
PROVINSI DKI JAKARTA,



MOCHAMAD MIFTAHULLOH T
NIP.197812131997111001

RENCANA PEMBELAJARAN

Pelatihan Penanggulangan Kemiskinan (Analisis Kemiskinan)

Pokok Pembahasan / Sub Pokok Bahasan	Indikator Keberhasilan	*Metode Pembelajaran	Kegiatan		Alokasi Waktu (Menit) 1 JP = 45 menit		Sumber Belajar
			Fasilitator	Peserta	*T	*P	
Pengenalan Awal terkait Situasi Kemiskinan pada skala global, nasional dan lokal.	Peserta mampu menjelaskan mengenai situasi kemiskinan pada berbagai lingkup.	Diskusi	Widyaiswara/TNP2K RI		3	0	
Pengenalan Instrumen Pendataan Kemiskinan melalui Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas).	Peserta mampu menjelaskan mengenai instrumen pendataan kemiskinan.	Diskusi	BPS RI/BPS Provinsi DKI Jakarta		3	3	
Pengenalan Aplikasi Pengolahan Data Susenas (dalam pelatihan ini menggunakan STATA).	Peserta mampu mengoperasikan STATA.	Latihan	The SMERU Research Institute/LPEM FEB Universitas Indonesia		2	3	
Pengenalan dan Praktik Menghitung Tingkat Kemiskinan (P0), Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1), Indeks Keperahan Kemiskinan (P2), dan Tingkat Kemiskinan Ekstrem.	Peserta mampu menjelaskan dan menghitung indikator-indikator utama kemiskinan.	Latihan	BPS RI/BPS Provinsi DKI Jakarta dan The SMERU Research Institute/LPEM FEB Universitas Indonesia		3	9	

Pokok Pembahasan / Sub Pokok Bahasan	Indikator Keberhasilan	*Metode Pembelajaran	Kegiatan		Alokasi Waktu (Menit) 1 JP = 45 menit		Sumber Belajar
			Fasilitator	Peserta	*T	*P	
Pengenalan Indikator Inflasi, Tingkat Pengangguran Terbuka, dan Rasio Gini sebagai Beberapa Determinan dari Tingkat Kemiskinan.	Peserta mampu menjelaskan mengenai indikator yang menjadi determinan dari Tingkat Kemiskinan.	Latihan	BPS RI/BPS Provinsi DKI Jakarta dan The SMERU Research Institute/LPEM FEB Universitas Indonesia		2	3	
Analisis Korelasi antara Tingkat Kemiskinan dan Inflasi, Tingkat Pengangguran Terbuka, serta Rasio Gini.	Peserta mampu menjelaskan hasil analisis korelasi antara Tingkat Kemiskinan dan Inflasi, Tingkat Pengangguran Terbuka, serta Rasio Gini.	Latihan	The SMERU Research Institute/LPEM FEB Universitas Indonesia		2	3	

Catatan :

* T: Teori | P: Praktik

* Metode Pembelajaran adalah cara dalam menyajikan (menguraikan, memberi contoh, memberi latihan) isi pelajaran untuk mencapai tujuan tertentu, antara lain :

- a. Ceramah/diskusi;
- b. Visitasi/studi banding/benchmarking;
- c. Latihan/studi kasus/simulasi/bermain peran;
- d. tutorial; dan pembelajaran jarak jauh (e-learning)